BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers menjadi sebuah profesi yang punya peranan untuk media untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat publik. Pers menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, maupun sebaliknya. Baik dalam skala nasional atau lokal maupun internasional. Pers sangat memiliki peran besar dalam mendorong keterbukaan pandangan publik melalui informasi yang mereka sebar, pastinya termasuk melalui media massa yang digolongkan pada tiga jenis yaitu pertama, media cetak berupa surat kabar, majalah, jurnal, tabloid dan buletin. Kedua, media elektronik berupa televisi dan radio. Ketiga, berupa media internet/*online* seperti *website*, dan blog (Khalid, 2019: 91-92).

Pers memiliki kedudukan terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan informasi di masyarakat. Media pers pada kehidupan sosial, terkhusus dalam era masyarakat modern saat ini telah menjalankan peran pentingnya. Menurut McQuil dalam bukunya *Mass Communication Theories* terdapat 6 (enam) perspektif masyarakat ketika mengamati peran pers dijabarkan sebagai berikut (McQuail, 2000:66) :

- a. Media pers sebagai *window on event and experience*. Media pers diperumpamakan sebagai sebuah jendela yang bisa menjadi media bagi semua orang untuk mengetahui segala hal yang terjadi di dunia luar. Berita yang ada dalam media merupakan wadah untuk belajar mengetahui berbagai peristiwa.

- b. Media pers kerap dimaknai sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Dalam peran ini, media diharapkan menampilkan informasi secara faktual, objektif, dan jujur, sebagaimana apa yang terjadi di masyarakat.
- c. Media juga berfungsi sebagai penyaring atau gatekeeper, yang secara aktif memilih isu-isu tertentu untuk diangkat atau diabaikan. Dengan demikian, konten media bukan semata-mata cerminan dari kenyataan, melainkan hasil seleksi dan konstruksi oleh pihak redaksi maupun pelaku media.
- d. Media diposisikan sebagai penafsir sekaligus penunjuk arah bagi masyarakat. Dalam konteks ini, media membantu menjelaskan berbagai ketidakpastian serta memberikan panduan atas beragam alternatif yang tersedia dalam kehidupan sosial.
- e. Fungsi media juga terlihat sebagai ruang dialog publik, yakni forum terbuka bagi penyampaian gagasan, opini, dan informasi. Melalui peran ini, media mendorong partisipasi masyarakat serta memungkinkan terjadinya proses timbal balik antar pihak yang terlibat.
- f. Lebih dari sekadar saluran informasi satu arah, media pers juga berperan sebagai mitra komunikasi atau interlocutor. Peran ini membuka ruang interaksi yang bersifat timbal balik antara media dan audiens, sehingga terwujud komunikasi yang dinamis dan partisipatif.

Melihat peran pers yang memiliki fungsi utama sebagai jembatan informasi publik, menyebabkan tidak ada batasan ruang dan waktu untuk meliput suatu konflik. Salah satu konflik yang memiliki atensi besar dari masyarakat dunia saat ini, namun tidak semua masyarakat dunia bisa menyaksikan secara langsung di

lokasi kejadian adalah konflik bersenjata internasional. Dalam konflik bersenjata internasional pers akan banyak mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masyarakat dunia akan tahu bagaimana kondisi faktual dari keadaan di lapangan. Idealnya pers tidak melakukan manipulasi akan hasil liputan karena hal ini akan mempengaruhi profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi pers yang memiliki peran sebagai pengawas implementasi hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Kedudukan pers pada konflik bersenjata internasional dilihat dari pandangan hukum internasional menjadi sebuah objek yang teramat penting. Dalam HHI pers diberikan perlindungan selama meliput perang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang (Soselisa, 2023: 90). Selain itu, dalam Protokol Tambahan I memiliki relevansi dengan perlindungan media selama konflik bersenjata pada Pasal 79. Pasal ini menegaskan bahwa “orang-orang sipil” harus dilindungi terhadap serangan, termasuk tindakan yang diajukan untuk mencegah, menunda, atau menghalangi penyediaan bantuan kepada mereka.

- a. Pasal 81, pasal ini menyatakan bahwa “orang-orang sipil” dilarang jadi target serangan dan bahwa mereka serta barang-barang yang tidak digunakan untuk keperluan militer harus dihormati dan dilindungi.
- b. Pasal 82, pasal ini melarang penggunaan kekerasan terhadap “orang-orang sipil” yang mencakup penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan pembunuhan semena-mena.
- c. Pasal 79 – 91, Bagian III Protokol Tambahan I secara keseluruhan menetapkan berbagai hak dan perlindungan terhadap “orang-orang sipil” termasuk kebebasan bergerak, akses terhadap bantuan kemanusiaan, serta perlindungan terhadap penahanan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Perlindungan yang didapatkan pers dalam menunjang kelancaran tugasnya perlu diimbangi dengan menjalankan penuh kewajibannya. Kewajiban ini tidak

hanya mengenai tanggung jawab etika tetapi juga hukum, dikarenakan pelaksanaan tugas pers memiliki hubungan langsung dengan hak-hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, faktual, dan objektif (*freedom of speech*). Melalui analisis sembilan inti prinsip yang harus dijalankan baik oleh jurnalis/pers/wartawan (*Committee of Concerned Journalist*) dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kata yang melekat dengan kewajiban profesi jurnalisisme salah satunya pers itu sendiri, yaitu objektivitas, akurasi, dan keadilan. Media massa di lapangan diharapkan untuk selalu objektif dalam melaporkan fakta tanpa terpengaruh oleh bias politik, ideologi, atau ekonomi. Selalu akurasi melalui memastikan bahwa berita yang dilaporkan telah diverifikasi kebenarannya, dan adil dengan memberikan ruang yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyuarakan perspektif mereka (Musman: 2017: 7-9).

Salah satu konflik bersenjata antarnegara yang hingga kini masih menjadi sorotan media internasional adalah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini tetap menjadi isu yang hangat dan mendapat perhatian luas dari masyarakat global. Terletak di kawasan Timur Tengah, wilayah konflik ini melibatkan Palestina dan Israel—dua entitas yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam perebutan wilayah serta legitimasi politik. Sebelum meletusnya Perang Arab-Israel, komunitas Yahudi—yang kemudian membentuk negara Israel—merupakan kelompok tanpa negara (*stateless nation*), yang tersebar dalam komunitas-komunitas kecil di berbagai wilayah Eropa. Dengan dukungan kuat dari Inggris, populasi Yahudi secara bertahap dipindahkan ke wilayah Palestina. Hal ini memicu ketegangan dan kekacauan dalam pengaturan wilayah, yang hingga kini masih menyisakan konflik berkepanjangan. Salah satu tonggak sejarah yang memperumit

keadaan adalah penandatanganan Perjanjian Oslo oleh pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan tersebut dianggap memberikan legitimasi atas pembagian wilayah secara sepihak, yang oleh sebagian besar rakyat Palestina dipandang sebagai kerugian besar (*great loss*) bagi perjuangan mereka atas hak dan kedaulatan tanah air (Kurniati, 2010: 3).

Faktor-faktor yang memperkeruh eskalasi konflik antara Israel dan Palestina antara lain mencakup rencana sejumlah negara untuk memindahkan kantor kedutaan besar mereka ke Yerusalem serta pengakuan sepihak atas kota tersebut sebagai ibu kota Israel. Selain itu, pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk tuduhan tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, turut menjadi pemicu meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Sehingga permasalahan yang terjadi di antara dua negara ini mendapat perhatian besar oleh masyarakat dunia, dan isu ini konsisten diberitakan oleh media pers disebar ke seluruh penjuru dunia internasional (Amri, 2021: 33).

Mengapa pemberitaan terkait konflik internasional antara negara Palestina dan Israel tersebar cepat? Ketika media massa mengangkat konflik antara Palestina dan Israel sebagai bahan liputan, informasi mengenai pertikaian tersebut akan tersebar dengan cepat dan menjelma menjadi konstruksi pengetahuan dalam benak publik. Fenomena ini timbul dari tingginya kapasitas adaptif masyarakat dalam menyerap informasi baru, khususnya melalui kanal-kanal media, termasuk isu-isu berkaitan dengan konflik Palestina-Israel. Hal ini tercermin melalui proses objektivasi, di mana publik menunjukkan keterbukaan terhadap pola-pola penyampaian informasi yang ditawarkan oleh pers. Keterbukaan ini memfasilitasi terbentuknya relasi intersubjektif yang kemudian mengalami proses institusionalisasi, sehingga narasi

konflik tersebut dengan mudah mengakar dalam lanskap sosial masyarakat. Lambat laun, konflik antara Palestina dan Israel tidak lagi sekadar dipandang sebagai peristiwa eksternal, melainkan menjelma menjadi entitas yang melekat dalam dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari.

Melalui tahapan internalisasi, individu-individu dalam masyarakat yang telah terekspos secara intens terhadap konflik ini akan mulai mengaitkan identitas dan posisinya dengan informasi yang diterima. Pada tahap ini, masyarakat secara fungsional berperan sebagai bagian dari sirkulasi narasi konflik tersebut, menjadikannya sebagai sesuatu yang lumrah dalam kesadaran kolektif. Perkembangan media massa salah satunya media sosial yang banyak digunakan masyarakat dunia seperti *Instagram*, *X*, *Facebook*, dan lain-lain menyebabkan masyarakat terutama generasi muda sebagai mayoritas populasi di dunia familiar dengan isu ini (Amri, 2021: 37).

Realitanya dibalik difasilitasi pers secara hukum dalam dimudahkannya menjalankan tugas dan kewajiban, sayangnya terdapat banyak tindakan pelanggaran kewajiban pers khususnya pers yang tidak objektif dalam meliput konflik bersenjata internasional. Objektivitas membantu menjaga sebuah berita bisa tersampaikan dengan akurat dan dapat dipercaya. Ini juga memungkinkan *audiens* untuk membentuk pemahaman yang seimbang tentang situasi, karena mereka diberikan informasi dari berbagai perspektif. Dalam konteks konflik perang, ketidakobjektifan dapat mengakibatkan penyesatan atau pembengkotan fakta yang dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan risiko konflik yang lebih besar. Selain itu, ketika jurnalis tidak objektif, mereka dapat menjadi sasaran bagi pihak yang terlibat dalam konflik, membahayakan keselamatan mereka sendiri serta

integritas profesi jurnalistik secara keseluruhan. Jadi, menjaga objektivitas dalam peliputan konflik perang bukan hanya penting untuk integritas jurnalis, tetapi juga dalam menjamin supaya penyampaian informasi pada masyarakat bisa akurat dan dapat dipercaya. Berita yang disebar kepada publik dapat diperumpamakan sebagai jendela oleh publik dalam membentuk sudut pandang individu bahkan suatu kelompok terhadap isu tersebut (Musfialdy, 2019: 24).

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak ketidakobjektifan berupa bias media dalam pemberitaan konflik antara negara Palestina dengan Israel. Dalam "*Framing of the Israeli-Palestinian conflict in thirteen months of New York Times editorials preceding the 1967 war*" oleh Ross dan Bantimaroudis (2020) terdapat bias dari media oleh ketika menyajikan berita ini oleh *New York Times* yang cenderung melaporkan konflik ini dengan posisi menunjukkan keterpihakannya kepada Israel. Penelitian lain yang mengkaji media dari kawasan Arab, khususnya dalam konteks Arab Spring, menunjukkan kecenderungan keberpihakan terhadap Palestina dalam pemberitaan konflik Israel-Palestina. Preferensi serupa dapat ditemukan dalam perbandingan dua media internasional yang berasal dari latar belakang berbeda, yaitu Fox News dari Amerika Serikat dan Detik.com dari Indonesia. Dalam pemberitaannya, Fox News kerap merepresentasikan Palestina, terutama kelompok Hamas, dalam narasi terorisme, sekaligus menampilkan posisi pemerintah Amerika Serikat yang secara eksplisit mendukung Israel. Sebaliknya, Detik.com lebih sering menyusun narasi yang menempatkan Israel sebagai pihak penyerang, sementara Palestina digambarkan sebagai korban dari tindakan kekerasan yang berlangsung (Fiddienika, 2024:19639). Selain itu, dalam sisi studi sosiolinguistik terkait

pemilihan bahasa dan representasi identitas yang digunakan pers dalam menyajikan berita konflik Israel-Palestina ditemukan banyak sekali perbedaan preferensi linguistik dan pemilihan kata, sehingga mempengaruhi wawasan atau informasi yang dihasilkan pembaca/audiens akan berbeda. Hal ini diyakini disebabkan oleh entitas pers baik dalam aspek identitas sosial, budaya, maupun politik.

Tidak pernah terdengar bagaimana bentuk pertanggungjawaban pers terkait berita yang mereka sebar ke masyarakat hingga solusi atas kerugian yang didapatkan oleh negara-negara berkonflik tersebut. Secara Hukum Internasional belum ada yang mengatur secara jelas mengenai sanksi akibat pelanggaran prinsip objektivitas dalam meliputi konflik bersenjata khususnya antara Israel dengan Palestina ini, hanya perlindungan terhadap pers atau jurnalis sebagai warga sipil dalam wilayah perang. Melalui penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian secara lebih dalam terkait masalah yang sudah dijabarkan, hingga bisa diambil judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PERS DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS KETIDAKOBJEKTIFAN LIPUTAN DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Ditinjau dari penjabaran latar belakang bisa dilakukan pengidentifikasian masalah seperti dibawah ini:

1. Terdapat ketidakobjektifan oleh para pers dalam meliput konflik antara Israel dengan Palestina.

2. Ditemukannya pelanggaran prinsip ketidakobjektifan oleh pers dalam meliput konflik Israel dengan Palestina yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik.
3. Ketidakobjektifan pers dalam meliput konflik Israel dengan Palestina berdampak pada persepsi publik serta mempengaruhi penyelesaian konflik antara dua negara yang sedang berkonflik senjata.
4. Ketidakobjektifan pers dalam meliput konflik Israel dengan Palestina apakah merupakan suatu pelanggaran dan dicari kesesuaian dalam hukum internasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Guna memperjelas tujuan penelitian dari proposal skripsi ini perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini agar menjaga fokus penelitian pada topik yang spesifik dan relevan yang dapat menghindari risiko terjebak dalam penelitian yang terlalu luas ataupun tidak terkendali. Dengan menetapkan batas-batasan yang jelas dapat memperjelas tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini dan membantu untuk mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dalam penelitian.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah dipapar di atas, terdapat ruang lingkup masalah yang akan dilakukan bahasan pada karya tulis ini yakni dampak ketidakobjektifan dalam liputan media yang dilakukan oleh pers terhadap konflik senjata internasional antara Israel dengan Palestina, serta pertanggungjawaban pers terhadap dampak atas pelanggaran prinsip keobjektifitas yang telah terjadi dari perspektif Hukum Internasional. Apakah terdapat kekosongan hukum dalam mengatur sanksi atas pelanggaran prinsip

ketidakobjektivan pers dalam meliput konflik perang, khususnya konflik perang internasional Israel dan Palestina.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah dipaparkannya masalah penelitian ditinjau dari latar belakang yang sudah dijabarkan, hingga peneliti bisa melakukan perumusan dua rumusan masalah penelitian, yakni:

1. Bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari ketidakobjektifan dalam liputan media tentang konflik bersenjata Israel dengan Palestina?
2. Bagaimana hukum internasional mengatur mengenai pertanggungjawaban pers atas dampak ketidakobjektifan dalam liputan media terhadap konflik Israel dengan Palestina?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan guna memberikan kontribusi ilmiah secara mendalam dan bermakna untuk memahami kewajiban pers dalam konflik bersenjata internasional, khususnya melalui analisis yuridis yang sifatnya mendalam terhadap ketidakobjektifan liputan pers dalam konflik Israel-Palestina. Kemudian, secara rinci tujuan penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Yakni untuk melakukan identifikasi dan dapat menganalisa secara mendalam tentang pengaturan terkait dengan tinjauan yuridis terhadap pelanggaran kewajiban pers dalam meliput konflik bersenjata internasional,

khususnya dalam kasus ketidakobjektifan pers meliputi konflik Israel-Palestina.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran kewajiban oleh pers berupa ketidakobjektifan dalam liputan konflik bersenjata internasional antara negara Israel dengan Palestina, baik di tingkat global maupun lokal serta implikasinya terhadap prospek penyelesaian konflik kedepannya.
- b. Menganalisis melalui perspektif hukum internasional bagaimana hukum internasional mengatur terkait pertanggungjawaban pers atas dampak-dampak yang ditimbulkan akibat ketidakobjektifan liputan konflik bersenjata internasional negara Israel dengan Palestina.

1.6 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini bisa memberi manfaat positif dari sisi teoritis ataupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur dan wawasan akademik terkait analisis yuridis pelanggaran kewajiban pers khususnya bagi pers yang tidak meliput secara objektif dalam konflik bersenjata Israel-Palestina. Sedangkan secara praktis, harapannya penelitian ini bisa memberi solusi maupun rekomendasi yang aplikatif bagi subjek penelitian yaitu lembaga pers itu sendiri. Berikut ini merupakan penjabaran rinci terkait manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa memberi sumbangsih pada literatur hukum internasional dengan mengeksplorasi implikasi hukum internasional dari

ketidakobjektifan dalam liputan media tentang konflik bersenjata. Hal ini dapat membantu memperkaya pemahaman tentang prinsip hukum yang relevan dalam konteks konflik bersenjata. Selain itu, melalui analisis tentang ketidakobjektifan dalam liputan media dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan teori komunikasi, terutama pada konteks cara terbentuknya media bisa memberi persepsi dan opini publik tentang konflik bersenjata dan konsekuensinya dalam masyarakat. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip etika jurnalistik dalam konteks konflik bersenjata. Ini dapat memberikan pandangan baru tentang bagaimana media dapat mengatasi tantangan etis yang muncul dalam meliput konflik bersenjata dengan mempertimbangkan pertanggungjawabannya secara hukum mendatang apabila melakukan pelanggaran kewajiban.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberi tambahan wawasan di bidang Ilmu Hukum Internasional terkhusus tentang pengaturan yuridis terhadap kewajiban pers dalam konflik bersenjata internasional, khususnya dalam kasus ketidakobjektifan liputan dalam konflik negara Israel-Palestina.

b. Bagi Masyarakat

Memberi tambahan wawasan serta pemahaman untuk masyarakat terkait pengaturan yuridis terhadap kewajiban pers dalam konflik bersenjata internasional, khususnya dalam kasus ketidakobjektifan liputan dalam konflik negara Israel-Palestina. Ini dapat mendorong

praktis media untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi secara objektif dan netral. Dengan menyoroti masalah ketidakobjektifan dalam meliput konflik Israel dengan Palestina penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran publik tentang peran media dalam membentuk pemahaman serta persepsi mengenai konflik itu. Hal itu dapat memberi bantuan pada masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima. Melalui temuan bisa memberikan dasar bagi pengembangan perubahan kebijakan terkait dengan regulasi media dan standar liputan konflik bersenjata yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas media dan mengurangi risiko ketidakobjektifan dalam liputan konflik bersenjata internasional.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai kontribusi intelektual dalam pelaksanaan penelitian sejenis di masa mendatang, karya ini diharapkan dapat menjadi referensi alternatif bagi kalangan akademisi, khususnya peneliti di bidang ilmu hukum, dengan penekanan pada kajian hukum internasional. Selain itu, penelitian ini bisa memberi pandangan secara jelas mengenai pentingnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar jurnalistik yang etis bagi media dalam meliput konflik bersenjata internasionalnya, khususnya dalam penelitian ini adalah dalam konflik negara Israel-Palestina.